

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan utama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan ekonomi Negara Republik Indonesia adalah mencapai masyarakat adil, makmur dan merata. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri jalannya pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat yang disebut otonomi daerah.

Tujuan terpenting dalam pembangunan ialah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagipula untuk mewujudkannya pemerintah harus ekstra kerja keras dengan melaksanakan tugasnya. Pembangunan dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia, pemerintah seharusnya memberikan pengabdian dan peran serta langsung kepada masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pemerintahan sentralistik kurang tepat di Indonesia, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999, ini merupakan langkah awal untuk mengganti sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi (Suparmoko, 2001).

Menurut undang-undang otonomi, setiap daerah tingkat I/ provinsi dan daerah tingkat II/kabupaten diberikan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini tidak semua urusan diserahkan kepada daerah namun ada hal-hal tertentu yang diurus oleh pemerintah pusat salah satunya adalah masalah pertahanan keamanan. Setiap daerah diyakini mengetahui bagaimana daerahnya harus dibangun dan dikembangkan menurut sumber daya yang dimiliki baik untuk sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya. (Suparmoko, 2002).

Prinsip pemberian otonomi daerah pada dasarnya untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, pemberian otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah, hal ini bertujuan langsung dengan pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan. Pemerintah daerah dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat di daerahnya. Kemandirian keuangan daerah diartikan bahwa setiap pemerintah daerah otonomi, harus dapat membiayai seluruh keperluannya yang bersumber dari PAD. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah, disamping penerimaan lainnya yang berupa: bagi hasil pajak,

bukan pajak, sumbangan, dan bantuan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi serta pinjaman daerah (Bintoro, 1998).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pelaksanaan pembangunan daerah mengacu kepada pemerataan pembangunan dalam meningkatkan pendayagunaan potensi suatu daerah yang dimiliki. Dalam melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah dibutuhkan biaya yang cukup besar. Sumber-sumber pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih teliti dan cukup pintar dalam mengelola keuangan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik apabila PAD dioptimalkan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu dampak dari kebijakan yang harus dilaksanakan. Bagi suatu daerah indikator ekonomi penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai untuk arus pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator yang seringkali digunakan dalam melihat sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah adalah aspek ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai penopang kekuatan dan kelemahannya (Sukirno, 2004).

PDRB diartikan sebagai nilai barang atau jasa yang diproduksi didalam suatu negara dalam satu tahun tertentu, barang dan jasa yang diproduksi bukan saja milik perusahaan melainkan oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di suatu negara tersebut (Sukirno, 2004). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Adanya peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan pendapatan daerah. Penduduk berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah, dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang yang dikonsumsi. Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan daerah (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses *intern* perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari *ekstern* dan bersifat sementara atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya (Boediono, 1998).

Laju pertumbuhan ekonomi ditandai dengan laju kenaikan produk perkapita yang tinggi, sehingga untuk mendorong laju pertumbuhan perlu ditentukan prioritas pembangunan daerah. Ada tiga faktor komponen utama dalam pertumbuhan dari

setiap bangsa yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Todaro, 2000).

Provinsi DIY adalah salah satu provinsi dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, sejauh ini provinsi DIY terdiri dari 5 kabupaten/kota. DIY terletak di bagian Selatan Pulau Jawa, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. DIY memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki populasi 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km² (BPS, 2010).

Provinsi DIY mengalami kemajuan pesat dari segi pendapatan asli daerahnya, sebagian besar pendapatan tersebut dihasilkan dari sumber-sumber yang mempengaruhinya seperti pajak, retribusi dan lain-lain yang telah disahkan, daerah yang cukup potensial antara lain Kabupaten Sleman, Kota Yogya dan Kabupaten Bantul, tetapi yang mengalami potensi kontribusi PAD paling besar di Provinsi DIY ialah Kabupaten Sleman.

Tabel 1.1 menunjukkan Kabupaten Sleman menghasilkan PAD sebesar Rp. 449.270.306 juta, hal ini dikarenakan kabupaten Sleman merupakan kabupaten/kota yang serba ada meliputi pariwisata, agro bisnis (kafe/pertokoan), dan pendidikan. Sehingga disini terjadi transaksi ekonomi yang secara tidak langsung pengaruhnya dapat meningkatkan PAD di Provinsi DIY itu sendiri.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2013
(ribu Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	95.991.513
2.	Bantul	224.197.864
3.	Gunung Kidul	83.427.448
4.	Sleman	449.270.306
5.	Kota Yogyakarta	383.052.140

Sumber: BPS DIY

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa pada tahun 2013 kabupaten/kota yang memberikan peranan relatif besar dalam pembentukan PDRB Provinsi DIY adalah Kabupaten Sleman sebesar Rp 7.471.898 milyar. Dilihat dari potensi kabupaten/kota, penyumbang terbesar terhadap total PDRB DIY, merupakan daerah konsentrasi dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran maupun jasa-jasa lainnya. Setiap harinya menghasilkan output yang akan berpengaruh terhadap pendapatan di Provinsi DIY. Adanya peningkatan PDRB antar kabupaten/kota dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi DIY.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2000
(juta Rp)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2013
1.	Kulonprogo	2.062.182
2.	Bantul	4.645.476
3.	Gunung Kidul	3.825.350
4.	Sleman	7.471.898
5.	Kota Yogyakarta	6.498.900

Sumber: BPS DIY

Menurut teori ekonomi makro, dari sisi pengeluaran, pendapatan regional bruto adalah penjumlahan dari berbagai variabel termasuk di dalamnya adalah investasi. Ada beberapa hal yang sebenarnya berpengaruh dalam soal investasi ini. Investasi sendiri dipengaruhi oleh investasi asing dan domestik. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta dapat berasal dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Investasi pemerintah dilakukan guna menyediakan barang publik. Besarnya investasi pemerintah dapat dihitung dari selisih antara total anggaran pemerintah dengan belanja rutinnya.

Pengeluaran investasi baik oleh pemerintah maupun oleh swasta merupakan prasyarat bagi kegiatan ekonomi guna meningkatkan produksi nasional. Investasi

merupakan salah satu faktor produksi yang peranannya sangat dominan dalam peningkatan produksi sebagaimana tercermin melalui laju pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal diperoleh dari tabungan dan investasi yang disisihkan dari bagian pendapatan waktu sekarang untuk dapat memperbesar produksi dan pendapatan dimasa yang akan datang. "Investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pengusaha untuk membeli modal dan membina industri" (Sukirno, 2000).

Negara yang sedang berkembang dengan tingkat pendapatan yang masih relatif rendah menyebabkan tingkat investasi dalam negeri yang tercermin dalam penanaman modal dalam negeri dan tabungan domestik juga masih relatif kecil sehingga banyak sumber-sumber daya alam yang sebenarnya potensial belum digunakan secara optimal. Penyebab kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam karena diperlukan investasi baru dan penggunaan modal yang besar.

Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sebagian besar pengeluaran daerahnya. Suryono (2008) mengemukakan agar tugas pemerintahan yang diamanatkan oleh otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dibutuhkan sumber keuangan untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Salah satu indikator turunnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat adalah meningkatnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Pengembangan penerimaan daerah dengan intensifikasi hanya dapat dilakukan dengan pengembangan teknologi. Peningkatan sumber pendapatan tersebut bertujuan

agar daerah memiliki dana yang besar untuk membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penulis memilih Provinsi DIY karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor PAD yang terjadi di masing-masing kabupaten/kota terhadap Provinsi DIY. Maka peneliti mengangkat judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAD DI KABUPATEN DAN KOTA SE-PROVINSI DIY DI TAHUN 2007-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?
4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh faktor jumlah penduduk terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
2. Menganalisis pengaruh faktor PDRB terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
3. Menganalisis pengaruh faktor pengeluaran pemerintah terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.
4. Menganalisis pengaruh faktor investasi terhadap PAD di kabupaten/kota Se-Provinsi DIY.

1.3.2 Manfaat Penelitian.

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis mengenai PAD di kabupaten/kota provinsi DIY, serta dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia .
2. Bagi pemerintah dan pihak terkait, penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi yang terkait guna meningkatkan PAD di kabupaten/kota provinsi DIY di masa yang akan datang.

3. Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang PAD di kabupaten/kota provinsi DIY.
4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dikembangkan sebagai acuan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pedokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Kemudian teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan tentang jenis dan cara pengumpulan data, definisi operasional variabel, metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Menguraikan tentang deskripsi data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul sebagai hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Sehingga dapat ditarik benang merah dan implikasi dari penelitian yang dilakukan.